

ANALISIS DETERMINAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI INDONESIA

Aiga Fadillah¹, Rahmanta Ginting², Irsad Lubis³
Universitas Sumatera Utara
E-mail: aigafadillah@gmail.com

Abstrak

Produktivitas menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Fenomena terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia saat ini belum mampu memaksimalkan produktivitas tenaga kerja. Hal tersebut digambarkan dari data progres produktivitas tenaga kerja di Indonesia cenderung rendah persentasenya dan mengalami fluktuasi setiap tahun. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis determinan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Metode analisis menggunakan regresi data panel. Periode pengamatan tahun 2014-2019, dengan ruang lingkup data 33 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan Chow Test dan Hausman Test, model terbaik adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian adalah variabel Infrastruktur Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja. Sedangkan, variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Produktivitas Tenaga Kerja.

Kata kunci: produktivitas tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, infrastruktur ekonomi, dan upah minimum provinsi.

Abstract

Productivity is one of priorities Indonesian government. The phenomenon of increasing productive age population in Indonesia is currently not able to maximize labor productivity. It is illustrated by the data of progress labor productivity in Indonesian whose tends being wane the percentage and fluctuate every year. Specific purpose of this research to prove empirically and analyze determinant of labor productivity in Indonesia. Analysis method uses panel data regression. The observation period is 2014-2019, with the data scope for 33 Provinces in Indonesia. Based on Chow Test and Hausman Test, the best model is Fixed Effect Model. The results are variables of Infrastructure of Economic and Provincial Minimum Wage have positive and significant effect on Labor Productivity. Meanwhile, variable of Human Development Index does not have effect on Labor Productivity.

Keywords: Labor Productivity, Human Development Index, Infrastructure of Economic, and Provincial Minimum Wages.

1. PENDAHULUAN

Produktivitas menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dari masuknya program peningkatan produktivitas dalam Nawacita yang digagas pemerintah periode 2014-2019 lalu. Pada tujuan ke-enam Nawacita menegaskan program pemerintah adalah, “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya” (Asnawi, 2018). Produktivitas tenaga kerja

juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di bawah tujuan ke-delapan: mempromosikan berkelanjutan, inklusif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, dan pekerjaan layak untuk semua (*United Nations*, 2015).

Atas landasan tersebut, produktivitas tenaga kerja dapat kita lihat sebagai aspek yang perlu ditingkatkan. Mengingat Indonesia pada tahun 2020-2030 akan mengalami *booming* bonus

demografi. Menurut Suryadi (2018) bonus demografi merupakan suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sementara proporsi usia muda semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

International Labor Organization (2020) menetapkan formula produktivitas tenaga kerja sebagai berikut :

$$\text{Labour Productivity} = \frac{\text{GDP at constant prices}}{\text{number of employed persons}} \dots\dots\dots (1.1)$$

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. Per-17/MEN/VII/2005 Pasal 4 Ayat 6 menjelaskan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama. Asumsi bahwa nilai PDRB adalah merupakan hasil dari seluruh tenaga kerja yang melakukan proses produksi pada periode tertentu. Nilai yang diperoleh merupakan hasil perhitungan agregat seluruh kegiatan perekonomian yang ada disuatu daerah dan yang terdata oleh Badan Pusat Statistik.

International Labor Organization Statistics (ILOSTAT) mengeluarkan data produktivitas tenaga di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan, yaitu tahun 2014 (3,31%), tahun 2015 (4,10%), tahun 2016 (3,71%), tahun 2017 (1,97%), tahun 2018 (3,05%), dan tahun 2019 (3,68%). Dari data tersebut, progres produktivitas tenaga kerja di Indonesia cenderung rendah persentasenya dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Oleh karena itu, permasalahan rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia menjadi salah satu program kerja yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Ketenagakerjaan. Ditjen Binalattas bertugas menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas (Kemnaker, 2018).

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja produktivitas tenaga kerja di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Memperbaiki tingkat indeks pembangunan manusia, agar kualitas tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian.
2. Penggunaan infrastruktur ekonomi yang efektif dan memfasilitasi kegiatan produktif.
3. Perlunya penetapan regulasi upah minimum untuk melindungi kebutuhan hidup layak tenaga kerja di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (2020:12) menyatakan bahwa IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dikutip dari (Yektiningsih, 2018), *Human Development Report* Tahun 1995 menyatakan bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan, satu diantaranya yaitu: produktivitas. Penduduk harus meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

Bahari et al. (2018) menyatakan bahwa infrastruktur termasuk bagian dari modal fisik yang menyediakan layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Menurutnya, sistem transportasi dan komunikasi, jalan, pembangkit listrik,

sekolah, dan sebagainya merupakan bagian dari infrastruktur yang menentukan bagaimana kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa.

Badan Perencanaan Nasional (2020) merilis jenis infrastruktur ekonomi dalam indikator pembangunan ekonomi inklusif sebagai berikut:

1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN.
2. Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam.
3. Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang.

Teori dorongan kuat menyatakan bahwa perlu dibangun dahulu infrastruktur, semua yang lain berkembang kemudian mengalir (*trickle down effect*). Teori ini selanjutnya menyatakan bahwa untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu “dorongan kuat” atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum suatu investasi.

Izzaty dan Sari (2013) menjelaskan pengertian UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi, ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) yang unsurnya tripartit yaitu pengusaha, pemerintah, serikat buruh/serikat pekerja, ditambah perguruan tinggi dan pakar. Penetapan UMP ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal 1 Januari. Upah minimum berlaku selama 1 tahun dan merupakan upah bulanan terendah yang diterima semua jenis status buruh, yang masih lajang dan memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun.

Lebih lanjut dalam Pratomo dan Saputra (2011) prinsip-prinsip penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 di antaranya adalah dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk memelihara prestasi kerja

(produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha.

Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama di negara-negara maju, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara kenaikan upah riil para pekerja dengan kenaikan produktivitas mereka. Analisis teori upah efisiensi menjelaskan hubungan antara upah riil dan produktivitas. Keadaan dalam teori tersebut menunjukkan bahwa kenaikan tingkat upah akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Sukrino, 2012:353).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Determinan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Urgensi penelitian adalah perlunya perbaikan kinerja produktivitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam perekonomian internasional.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan waktu penelitian pada tahun 2020. Periode pengamatan mulai tahun 2014 hingga tahun 2019, dengan ruang lingkup data 33 Provinsi di Indonesia. Adapun periode pengamatan dipilih dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 karena untuk mengevaluasi kinerja program pemerintah pada periode tersebut. Adapun ruang lingkup data dipilih dari 33 provinsi karena ada data beberapa variabel di provinsi Kalimantan Utara yang baru di mulai tahun 2015. Sehingga tidak memungkinkan untuk menghimpun data keseluruhan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data panel. Data panel merupakan gabungan data *time series* dan data *cross section*. Keunggulan penggunaan data panel adalah:

1. Secara teknis, data panel dapat memberikan data yang informatif, mengurangi kolinearitas antar peubah serta meningkatkan derajat kebebasan yang artinya meningkatkan efisiensi.
2. Data panel mampu mengontrol heterogenitas individu. Dengan metode ini estimasi yang dilakukan dapat secara eksplisit memasukkan unsur heterogenitas individu (Firdaus, 2018:211).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan laporan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan suatu hasil kerja yang dicapai (*output*) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (*input*) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai sasaran pembangunan nasional. Indikator pengukurannya adalah PDRB menurut harga konstan dibagi jumlah tenaga kerja. Satuan variabel ini adalah juta rupiah.
2. Indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan presentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli untuk mewakili kualitas sumber daya manusia. Variabel ini menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi (Metode Baru) dari tahun 2014-2019. Satuan variabel ini adalah rasio.
3. Infrastruktur ekonomi adalah layanan dan fasilitas yang diperlukan masyarakat luas agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna telepon seluler. Variabel ini menggunakan data Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler

Menurut Provinsi tahun 2014-2019. Satuan variabel ini adalah persen (%).

4. Upah minimum provinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Variabel ini menggunakan data Upah Minimum Provinsi (UMP) per Bulan Menurut Provinsi tahun 2014-2019. Satuan variabel ini adalah juta rupiah.

Analisis ekonometrika dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Infrastruktur Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja dapat ditulis dengan persamaan:

$$PTK_{it} = \alpha_{0it} + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 IE_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (2.1)$$

Kemudian persamaan tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk model aplikatif menggunakan *logaritmanatural* (ln) yaitu:

$$\ln PTK_{it} = \alpha_{0it} + \beta_1 (\ln IPM_{it}) + \beta_2 (\ln IE_{it}) + \beta_3 (\ln UMP_{it}) + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (2.2)$$

Keterangan:

- α_0 = konstanta
- $\beta_{1,2,3}$ = koefisien regresi variabel
- PTK = produktivitas tenaga kerja
- IPM = indeks pembangunan manusia
- IE = infrastruktur ekonomi
- UMP = upah minimum provinsi
- i = daerah/provinsi
- t = tahun
- ε = *error term*

Pada metode regresi data panel terdapat tiga model data panel yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Ketiga pendekatan tersebut memiliki sifat opsional. Untuk menentukan mana di antara tiga model tersebut yang paling tepat, digunakan *Chow Test* dan *Hausman Test*. *Chow Test* digunakan untuk memutuskan apakah menggunakan *CEM* atau *FEM*, sedangkan *Hausman Test* digunakan untuk memutuskan apakah menggunakan *FEM* atau *REM*.

Uji asumsi klasik tidak diperlukan dalam analisis data panel karena data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul pada hasil analisis, memberi lebih banyak informasi,

variasi, dan *degree of freedom* (Gujarati, 2012:237). Analisis ekonometrika pada penelitian ini menggunakan software *E-Views 10*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

1) *Chow Test*

Tabel 3.1 *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: POOL1

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	142.107482	(32,162)	0.0000
Cross-section Chi-square	667.206110	32	0.0000

Sumber : *E-Views 10*, data diolah.

Chow Test digunakan untuk melihat model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Dari hasil *Chow*

Test nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$ menunjukkan model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

2) *Hausman Test*

Tabel 3.2 *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOL1

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.228244	3	0.0042

Sumber : *E-Views 10*, data diolah.

Dari hasil *Hausman Test* nilai probabilitas $0.0042 < 0.05$ artinya nilai tersebut tetap menunjukkan hasil yang

konsisten. Antara *Chow Test* dan *Hausman Test* model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

3) Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Tabel 3.3 Estimasi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: lnPTK?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/20/20 Time: 07:36

Sample: 2014 2019
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.63684	4.501642	2.807162	0.0056
lnIPM?	-1.465980	1.422974	-1.030223	0.3044
lnIE?	1.396233	0.185753	7.516604	0.0000
lnUMP?	0.433887	0.105744	4.103194	0.0001
Fixed Effects (Cross)				

Sumber : *E-Views 10*, data diolah.

Hasil uji regresi dengan metode *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel di atas. IPM memiliki nilai konstanta sebesar -1.465980 dengan nilai probabilitas yaitu $0.3044 > 0.05$. Artinya, IPM tidak berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Infrastruktur ekonomi memiliki nilai konstanta sebesar 1.396233 dengan nilai probabilitas yaitu $0.0000 < 0.05$. Artinya, Infrastruktur ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Sedangkan UMP memiliki nilai konstanta sebesar 0.433887 dengan nilai probabilitas yaitu $0.0001 < 0.05$. Artinya, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.

3.2 PEMBAHASAN

Hasil estimasi adalah:

$$\ln PTK = 12.63684 + (-1.465980) \ln IPM + 1.396233 \ln IE + 0.433887 \ln UMP \dots\dots\dots (4.1)$$

Dari persamaan regresi di atas dapat kita simpulkan bahwa jika diasumsikan tidak ada IPM, infrastruktur ekonomi, dan UMP, *ceteris paribus*, maka produktivitas tenaga kerja di Indonesia sebesar 12.63684. Artinya iklim ketenagakerjaan di Indonesia masih bergantung kepada indeks pembangunan manusia, infrastruktur ekonomi, dan kebijakan upah minimum provinsi. Semua pihak perlu memaksimalkan hal-hal tersebut untuk memacu produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

Nilai koefisien konstanta regresi sebesar 12.63684 juga menunjukkan bahwa

variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia, infrastruktur ekonomi, dan upah minimum provinsi mempengaruhi variabel dependen dengan pengaruh positif meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Lebih lanjut, interpretasi masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa IPM tidak memberikan pengaruh terhadap kenaikan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Baharin dkk (2020) bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih menjadi masalah bagi produktivitas tenaga kerja. Fenomena yang terjadi adalah terdapat gap antara jumlah angkatan kerja dan penyediaan lapangan kerja.

Indeks Pembangunan Manusia memang meningkat setiap tahunnya, program pelatihan telah dijalankan, namun mayoritas angkatan kerja di Indonesia cenderung masih mencari lapangan pekerjaan daripada menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha. Banyak *freshgraduate* yang masih menganggur dan belum memberikan kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Pernyataan tersebut didukung oleh data di Badan Pusat Statistika yang memperlihatkan bahwa jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan masih didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2. Infrastruktur Ekonomi (IE)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa infrastruktur ekonomi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia dengan koefisien sebesar 1.396233. Hal ini berarti kenaikan infrastruktur ekonomi yaitu persentase penduduk yang memiliki telepon genggam sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 1.396233 juta rupiah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Widayati (2010) bahwa semua infrastruktur (jalan, listrik, telepon, dan air bersih) memiliki pengaruh terhadap produktivitas ekonomi. Secara ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur akan mempengaruhi *marginal productivity of private capital*. Sedangkan secara ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur akan berpengaruh pada pengurangan biaya produksi.

3. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dari hasil regresi ditemukan bahwa UMP memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia dengan koefisien sebesar 0.433887. Hal ini berarti kenaikan UMP sebesar 1 juta rupiah akan menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 0.433887 juta rupiah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Novianto dan Marsisno (2019) bahwa upah secara signifikan berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Terdapat hubungan erat antara jumlah tenaga kerja dan pendapatan, karena tingkat pendapatan akan menghasilkan harga waktu sehingga sebagian orang cenderung menambah jam kerja untuk mendapatkan upah yang lebih besar.

Pengujian Validitas Model

Nilai probabilitas ($F\text{-stat}$) = 0.00000 < 0.05. Artinya, secara bersama-sama peningkatan dari masing-masing variabel independen dalam model secara signifikan mempengaruhi peningkatan variabel dependen. Nilai R^2 sebesar 0.985778

artinya model secara representatif dapat menjelaskan 98.58 persen variasi produktivitas tenaga kerja yang dijelaskan oleh 3 variabel independen di dalam model. Sedangkan sisanya 1.42 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Model dan Interpretasi

Berdasarkan hasil *Fixed Effect Model*, dari 33 Provinsi di Indonesia yang mempunyai kinerja produktivitas tenaga kerja tertinggi hingga terendah terlihat dari tabel nilai intersep berikut:

Tabel 4.1 Nilai Intersep

No.	Provinsi	Intersep
1.	_Aceh	-0.279590
2.	_Sumatera_Utara	0.1665640
3.	_Sumatera_Barat	-0.073806
4.	_Riau	0.7957880
5.	_Jambi	0.0843280
6.	_Sumatera_Selatan	-0.076767
7.	_Bengkulu	-0.379011
8.	_Lampung	-0.206775
9.	_Kepulauan_Bangka_Be litung	-0.187812
10.	_Kepulauan_Riau	0.6548970
11.	_DKI_Jakarta	1.1874450
12.	_Jawa_Barat	-0.014326
13.	_Jawa_Tengah	-0.116761
14.	_DI_Yogyakarta	-0.320590
15.	_Jawa_Timur	0.2138150
16.	_Banten	0.0593490
17.	_Bali	-0.213641
18.	_Nusa_Tenggara_Barat	-0.382415
19.	_Nusa_Tenggara_Timur	-0.426630
20.	_Kalimantan_Barat	-0.227284
21.	_Kalimantan_Tengah	-0.224188
22.	_Kalimantan_Selatan	-0.416656
23.	_Kalimantan_Timur	0.9990500
24.	_Sulawesi_Utara	-0.133660
25.	_Sulawesi_Tengah	0.0822670
26.	_Sulawesi_Selatan	0.0046380
27.	_Sulawesi_Tenggara	-0.044490
28.	_Gorontalo	-0.393005
29.	_Sulawesi_Barat	-0.260520
30.	_Maluku	-0.377586
31.	_Maluku_Utara	-0.236930
32.	_Papua_Barat	0.3360040
33.	_Papua	0.4082980

Sumber : *E-Views 10*, data diolah.

Kinerja produktivitas tenaga kerja tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai intersep 1.1874450. Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{_DKI_Jakarta} = 12.63684 + 1.1874450 + (-1.465980) \ln\text{IPM} + 1.396233 \ln\text{IE} +$$

0.433887 lnUMP (4.2) Nilai koefisien konstanta regresi sebesar $12.63684 + 1.1874450 = 13.824285$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia, infrastruktur ekonomi, dan upah minimum provinsi mempengaruhi variabel dependen dengan pengaruh positif meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta.

Kinerja produktivitas tenaga kerja terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai intersep -0.426630 . Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{_Nusa_Tenggara_Timur} = 12.63684 + (-0.426630) + (-1.465980) \ln \text{IPM} + 1.396233 \ln \text{IE} + 0.433887 \ln \text{UMP} \dots \dots \dots (4.3)$$

Nilai koefisien konstanta regresi sebesar $12.63684 + (-0.426630) = 11.21021$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia, infrastruktur ekonomi, dan upah minimum provinsi mempengaruhi variabel dependen dengan pengaruh positif meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

- 1) Iklim ketenagakerjaan di Indonesia masih bergantung kepada indeks pembangunan manusia, infrastruktur ekonomi, dan kebijakan upah minimum provinsi. Semua pihak perlu memaksimalkan hal-hal tersebut untuk memacu produktivitas tenaga kerja di Indonesia..
- 2) IPM memiliki nilai konstanta sebesar -1.465980 dengan nilai probabilitas yaitu $0.3044 > 0.05$. Artinya, IPM tidak berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja.
- 3) Infrastruktur ekonomi memiliki nilai konstanta sebesar 1.396233 dengan nilai probabilitas yaitu $0.0000 < 0.05$. Artinya,

Infrastruktur ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.

- 4) UMP memiliki nilai konstanta sebesar 0.433887 dengan nilai probabilitas yaitu $0.0001 < 0.05$. Artinya, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.
- 5) Kinerja produktivitas tenaga kerja tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai intersep 1.1874450 . Sedangkan kinerja produktivitas tenaga kerja terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai intersep -0.426630 .

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Anita. (2018). *Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Indonesia di Pasar Internasional Sebagai Upaya Mendukung Tercapainya Pembangunan Nasional*. Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi. 2(1), 194-207.
- Badan Pusat Statistika. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Jakarta: BPS - Statistics Indonesia.
- Bahari, S. Hariyanto, D. dan Safitri, H. (2018). *Pengaruh Solvabilitas, Likuiditas, dan Aktivitas terhadap Profitabilitas Perusahaan Jasa Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI*. Jurnal Produktivitas. 5(1).
- Baharin, R. Aji, R.H.S. Yussof, I. dan Saukani, N.M. (2020). *Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia*. Iranian Journal of Management Studies (IJMS). 13(1), 139-164.
- Bappenas. (2020). *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Retrieved July 7, 2020, from <http://inklusif.bappenas.go.id/>
- Firdaus, M. (2018). *Aplikasi Ekonometrika: Untuk Data Panel dan Time Series*. Bogor: IPB Press.
- Gujarati, D.N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Terjemahan Mangunsong, R.C. Buku 2. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

- ILOSTAT. (2020). *Statistics On Labour Productivity*. Retrieved July 7, 2020, from <https://ilostat.ilo.org/topics/labour-productivity/>
- International Labor Organization. (2020). *Indicator Description: Labour Productivity*. Retrieved July 7, 2020, from <https://ilostat.ilo.org/resources/methods/description-labour-productivity/>.
- Izzaty dan Sari, Rafika. (2013). *Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 4(2), 131 – 145.
- Kemnaker. 2018. *Binalattas*. Retrieved July 7, 2020, from <https://kemnaker.go.id/unit/binalattas>
- Novianto, A.F. dan Marsisno, W. (2019). *Labor Productivity Convergence In Indonesia: Spatially Dynamic Panel Data Analysis*. *Jurnal EKO-REGIONAL*. 14(2), 94-108.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. Per-17/MEN/VII/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Layak Hidup. Retrieved July 7, 2020, from https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2005-4-5.pdf
- Pratomo, D.S. dan Saputra, P.M.A. (2011). *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945*. *Journal of Indonesian Applied Economics*. 5(2), 269-285.
- Sukirno, Sadono. (2012). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryadi. (2018). *Dampak Peningkatan Usia Harapan Hidup Penduduk Indonesia Terhadap Struktur Demografi Dan Perawatan Lanjut Usia*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 143-156.
- United Nations . (2015). *Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development: the 17 Goals*. Retrieved July 7, 2020, from <https://sdgs.un.org/goals>
- Widayati, Enik. (2010). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktivitas Ekonomi di Pulau Jawa Periode 2000 – 2008*. *Jurnal Media Ekonomi*. 18(1), 41-64.
- Yektiningsih, Endang. (2018). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018*. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*. 18(2), 32-50.